



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022





BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan

Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V PENUTUP

(2) Renja PD Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
- ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 6 Agustus 2021



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 6 Agustus 2021



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 32

KATA PENGANTAR

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling utama, sehingga dengan berbagai usaha manusia akan mencukupinya. Kebutuhan pangan yang seimbang antara kalori, energi, protein, karbohidrat, vitamin dan mineral sangat menentukan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mencapai masyarakat yang sehat, sejahtera dan mandiri.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat disusun sebagai dasar melakukan kegiatan bertahap untuk terwujudnya visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat yang sudah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2022 ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif. Program ini merupakan program untuk masyarakat sehingga masyarakat benar-benar merupakan subyek bukan sebagai obyek pembangunan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, Namun demikian sudah diupayakan bahwa masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan ditingkat individu dan rumah tangga dapat terakomodasi dengan baik, sehingga Renja ini bermanfaat demi terwujudnya ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Pasaman barat yang berkelanjutan.

Sukamenanti, 06 Agustus 2021
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman barat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1. 1. Latar Belakang	I-1
1. 2. Landasan Hukum.....	I-3
1. 3. Maksud dan Tujuan	I-5
1. 4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020	II-1
2. 1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan.....	II-1
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.....	II-2
2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan.....	II-3
2.3.1 Konsumsi Energi dan Protein.....	
2.3.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.....	
2.3.3 Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	
2.3.4 Distribusi Pangan.....	
2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-5
2. 5 Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN.....	III-1
3. 1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan.....	III-1
3. 3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan serta bahan baku pangan yang lain. Karenanya bahan pangan perlu selalu tersedia di daerah-daerah pemukiman dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak dan secara medis aman dikonsumsi. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Disamping itu pangan juga termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mencapai kemakmuran rakyat, salah satunya adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Mengingat pentingnya mencukupi kebutuhan pangan, maka pembangunan ketahanan pangan merupakan fondasi bagi pembangunan sektor lainnya. Karena produksi pangan sebagian besar dihasilkan oleh petani dengan skala usaha kecil masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Ketahanan pangan sendiri mencakup aspek yang luas yaitu aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan, dan untuk mewujudkannya perlu didukung semua stakeholder baik pemerintah maupun masyarakat. Ketahanan pangan harus terwujud pada tingkat Nasional, lokal, rumah tangga serta individu. Dinamika dan Kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang, sehingga perlu diatasi dan diantisipasi melalui kerja sama yang harmonis antar seluruh aspek dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan sedapat mungkin melibatkan peran masyarakat berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga peran pemerintah dapat lebih berdaya guna dan berhasil dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pemanfaatan sumberdaya alam dan pengembangan sumberdaya manusia yang didukung oleh penyediaan akses modal dan akses pasar.

Salahsatu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan. Kebijakan tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga dimaksudkan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat agar mengkonsumsi bahan pangan yang beranekaragam dan lebih baik gizinya. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu pola konsumsi masyarakat umumnya masih mempunyai ketergantungan yang kuat terhadap beras.

Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat tahunan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pangan harus menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat urusan dibidang pangan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pembangunan secara keseluruhan. Dinas Ketahanan Pangan sebagai Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja OPD tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan kegiatan OPD tahun 2022 yang berpedoman pada RPJMD dan RKPD, sehingga untuk tahun 2022 semua pembangunan Ketahanan Pangan merupakan implikasi dari aspirasi masyarakat untuk terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Pasaman Barat yang berkelanjutan.

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang pangan.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas Ketahanan Pangan melalui program dan kegiatan penyelenggaraan ketahanan pangan;

3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian capaian kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat;
4. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasaman Barat yang berkelanjutan akan terwujud apabila tercapai tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya pasokan pangan di tingkat rumah tangga dan berkurangnya penduduk rawan pangan;
2. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam mendukung terwujudnya kemandirian pangan;
3. Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta halal;
4. Menurunnya konsumsi beras per kapita dengan memanfaatkan sumber pangan lokal non beras;
5. Meningkatnya akses pangan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renja Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 terdiri atas:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L

dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2020)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD.

2.5 Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari Kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, maupun dari OPD kKabupaten yang ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusaan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

BAB V. PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN PANGAN TAHUN 2020



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Pasaman Barat termasuk daerah agraris, dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian dan perkebunan. Namun beberapa komoditi pangan di Kabupaten Pasaman Barat dari aspek ketersediaan belum mencukupi yang menyebabkan disaat-saat tertentu mengalami gejolak harga yang sulit dipenuhi oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi yang masih rendah. Masih adanya masyarakat yang sulit mengakses pangan karena tingkat pendapatannya yang rendah dan fluktuatifnya nilai harga pangan. Dengan adanya kecenderungan alih fungsi lahan yang semakin meningkat, sementara permintaan akan pangan terus meningkat, dikhawatirkan terjadinya penurunan cadangan pangan masyarakat.

Keanekaragaman pangan di daerah menjamin pola konsumsi kesehatan. Keragaman pola konsumsi merupakan hal yang penting karena terpenuhinya energi dan protein yang diperlukan tubuh. Ketergantungan konsumsi nasional, sampai saat ini sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa keanekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal dengan terbatasnya teknologi pengolahan pangan lokal serta perlunya keamanan pangan lokal yang akan diolah agar tidak timbul masalah setelah dikonsumsi.

Pada tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 6 program yang terdiri dari 17 kegiatan, sementara pada tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 program dengan 15 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

Adanya kecenderungan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SOPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja SOPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SOPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan seperti terlihat pada tabel 2.1 (Tabel T-C.29)

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan
Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan s.d Tahun 2020
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra OPD) th 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Cat
				Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi Fisik (%)	
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Pelatihan dan pengawasan keamanan mutu dan pembinaan pedagang, petani dan konsumen	1 Kali dan 30 sample	1 Kali dan 30 sample	1 Kali dan 15 sample	50	Refocussing anggaran
	Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijakan daerah	1 kali pertemuan	1 kali pertemuan	-	-	Refocussing anggaran
	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Terlaksananya Pemanfaatan Lahan Pekarangan masyarakat dengan pola P2KP	39 KWT	11 KWT	11 KWT	100	
	Pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya penganekaragaman melalui pengolahan pangan lokal	44 KWT	20 KWT	10 KWT	50	Refocussing anggaran

	Panel harga dan pemantauan harga pasar	Terlaksananya Panel Harga dan Pemantauan harga Pasar	11 pasar	11 pasar	11 pasar	100	
	Pemantauan ketersediaan pangan masyarakat	Jumlah Pemantauan ketersediaan Pangan ditingkat Pedagang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama	Akses fortifikasi bahan pangan utama dan regulasi mengenai keamanan pangan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100	
	Penyusunan peta kerawan pangan (FSVA)	Tersedianya database ketahananpangantingkat abupatenpasamanbarat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
2.	Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan						
	Pengembangan desa mandiri pangan (DMP)	Terbinannya 2 kelompok DMP yang berbasis pemberdayaan di Nagari Desa Baru dan Kinali	11 Kelompok	8 Kelompok	2 Kelompok	25	Refocussing anggaran
	Penyediaan cadangan pangan pemerintah	Jumlah pengadaan stok cadangan pangan pemerintah	92 Ton	2.5 Ton	50 Ton	2000	Hibah untuk covid-19

	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Terlaksananya penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan Kabupaten Pasaman Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan						
	Mengikuti Pekan Nasional (Penas) Tani	Jumlah KTNA yang ikut serta dalam penas tani	1 kali	1 kali	-	-	Refocussing anggaran

Dari uraian tabel diatas menjelaskan bahwa dari target tolak ukur kegiatan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan tahun 2020 pada pelaksanaan kegiatan strategis dapat tercapai dengan baik dalam mencapai sasaran RPJMD untuk Dinas Ketahanan Pangan meningkatkan cadangan pangan dan meningkatkan energi protein perkapita.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan peningkatan ketahanan pangan adalah :

1. Banyaknya nagari yang masih di katogikan penduduknya pada zona penanganan stunting;
2. Ketersediaan pangan yang kurang stabil/kelangkaan jenis pangan tertentu pada waktu tertentu;
3. Konversi lahan pertanian ke non pertanian yang berimbas pada penurunan produksi dan ketersediaan bahan pangan, sementara permintaan akan pangan terus meningkat;
4. Keterbatasan sumberdaya manusia dan infrastruktur;
5. Tidak stabilnya harga pangan tertentu, misalnya cabe, beras, gula dan komoditi pangan lainnya;
6. Keterbatasan sistem informasi harga yang dapat diakses petani dan kelayakan harga ditingkat petani masih rendah;
7. Keterbatasan akses terhadap data, sehingga keakuratan data ketahanan pangan masih harus disempurnakan;
8. Belum kuatnya kelembagaan pangan di tingkat kelompok Tani/Gapoktan/KWT;
9. Penanggulangan kemiskinan dan bencana belum optimal;
10. Pengankaragaman pangan yang belum optimal;
11. Masih Terbatasnya teknologi pengolahan pangan;
12. Masih adanya jajanan anak sekolah yang belum aman untuk dikonsumsi;
13. Kesadaran individu/pelaku usaha pangan terhadap keamanan pangan masih rendah;
14. Penanganan daerah rawan pangan belum optimal;
15. Belum sepenuhnya dijadikannya peta rawan pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
16. Tidak adanya pos cek point di pintu-pintu masuk ke Kabupaten Pasaman Barat sehingga data arus masuk pangan dan peredaran bahan berbahaya pangan sulit di deteksi.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90	82	89.84	89.94	90.57	90.57	77	79	80	81	
2	Penguatan Cadangan Pangan	60	60	81	91	100	100	20	30	40	60	
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90	80	90	95	97	100	70	73	75	80	
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	80	97	98	100	100	75	77	78	80	
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	85	79.48	80.25	81.5	82	82	83	84	85	
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	80	92	95	97	100	77	78	79	80	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Isu-isu penyelenggaraan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tentang: tingkat pelayanan, permasalahan, hambatan, dampak, tantangan, peluang dan formula dapat dijelaskan dibawah ini:

2.3.1 Konsumsi energi dan protein

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah pada kategori stunting (tumbuh pendek). Salah satu faktor penyebabnya adalah kekurangan gizi dan sarana pendukung kesehatan. Dinas ketahanan pangan berperan dalam peningkatan asupan gizi dengan cara meningkatkan asupan makanan yang bergizi oleh masyarakat, peranan ini memberikan peluang besar pada masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan menanam tanaman yang beragam dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarganya sendiri.

2.3.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Masih terdapat masyarakat miskin yang sulit mengakses pangan karena tingkat pendapatan yang rendah dan fluktuasinya harga pangan. Dengan adanya kecenderungan alih fungsi lahan yang semakin meningkat, sementara permintaan akan pangan terus meningkat, dikhawatirkan terjadinya penurunan cadangan pangan masyarakat berkurang. Maka perlu adanya rumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan yang menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan melalui program-program yang telah direncanakan seperti peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari dan pembinaan desa mandiri pangan.

2.3.3 Konsumsi dan Keamanan Pangan

Ketergantungan konsumsi pada satu jenis pangan pokok, merupakan salah satu titik rawan pangan nasional. Sampai saat ini mindset masyarakat adalah beras sebagai makanan pokok. Keanekaragaman produk pangan berbasis sumberdaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal dan teknologi pengelolaan pangan lokal masih sangat terbatas. Keragaman pokok pangan dengan cara yang menarik sangat terbatas. Untuk mengisi peluang tersebut, pelaku usaha pangan menawarkan kepada konsumen produk-produk tertentu dengan harga yang terjangkau namun dari sisi keamanan pangan diragukan. Maka perlu adanya rumusan kebijakan teknis dengan menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan mengenai pengolahan pangan lokal berbasis lokal yang aman dikonsumsi dan mempunyai nilai jual yang tinggi sehingga konsumen tertarik akan penampilan produk pangan hasil olahan dan merasa aman untuk mengkonsumsinya.

2.3.4 Distribusi Pangan

Masalah pangan merupakan tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat harus tercukupi sampai tingkat keluarga dan individu. Melalui pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat mandiri, kelembagaan masyarakat ditumbuh kembangkan dengan

sistem tunda jual sehingga cadangan pangan yang ada di masyarakat dapat terwujud dan berjalan. Permasalahan dasar yang ada di kelembagaan masyarakat adalah lemahnya permodalan, dan untuk mengatasinya perlu adanya penguatan modal lembaga masyarakat. Penguatan modal kelembagaan masyarakat dapat bersifat hibah (P-LDPM) dan bergulir, namun harus diikuti dengan pendampingan, pembinaan, monitoring serta pelaporan yang kontinyu.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi:

1. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas khususnya Pegawai Negeri Sipil teknis sehingga kinerja Dinas Ketahanan Pangan belum maksimal sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.
2. Kantor Logistik tidak bisa menyesuaikan harga dengan pasokan umum, karena berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Keppres No. 1 tahun 2010 harga gabah dan beras telah melampaui batas lebih tinggi 10% dari harga dasar pemerintah.
3. Data produksi pangan masih merupakan data agregat kecamatan dan belum rinci data desa sehingga kualitas dan validitas hasil analisis/pelaporan FSVA dan SKPG belum sesuai dengan yang diharapkan.
4. Data ekspor dan impor pangan masih terbatas pada data pangan tertentu, dan belum merupakan data pangan secara menyeluruh per kecamatan, sehingga sangat menghambat dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah.
5. Data kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kerawanan pangan.
6. Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat desa miskin belum maksimal.
7. Sarana dan Prasarana untuk keamanan pangan belum ada.
8. Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang keamanan pangan karena terbatasnya pengetahuan dan daya beli terhadap produk pangan yang aman. Dari beberapa isu yang ada dan terkait dengan tugas fungsi Kantor Ketahanan Pangan daerah yang menjadi kendala adalah sarana dan prasarana untuk keamanan pangan, untuk itu perlu adanya analisis ketersediaan pangan kabupaten yang ditinjau dari aspek kebutuhan untuk dikonsumsi. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menjaga ketersediaan pangan tidak dapat ditunda tunda lagi karena melihat kebutuhan ditahun tahun yang akan datang jauh lebih banyak dan bervariasi. Disamping disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk juga karena tingkat perubahan iklim yang tidak menentu yang sangat berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan. Dengan semakin siapnya pasokan ketersediaan pangan daerah, sedikit banyaknya dapat membantu kendala kerawanan pangan. Peningkatan sarana dan prasarana untuk keamanan pangan ini juga sangat berpengaruh terhadap

pola pikir masyarakat akan pentingnya ketersediaan pangan yang merupakan subsistem dalam sistem ketahanan pangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SOPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SOPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SOPD yang bersangkutan yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD memuat tabel 2.2 (Tabel T-C.31) mengenai review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dan memuat hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan tahun 2023 hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Pasaman Barat dilihat pada tabel 2.2 (Tabel T-C.31) berikut ini :

Tabel T-C.31

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Cat
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA				4.068.748.347	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA			4.068.748.347	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.761.400	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31.761.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	7 Dokumen	30.001.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	7 Dokumen	30.001.400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	2 Dokumen	1.760.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	2 Dokumen	1.760.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.432.418.135	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.432.418.135	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan	15 PNS	3.156.511.735	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan	15 PNS	3.156.511.735	

			tunjangan				tunjangan			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah non PNS (PTT/THL) Penunjang administrasi perkantoran	14 Orang	195.694.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah non PNS (PTT/THL) Penunjang administrasi perkantoran	14 Orang	195.694.400	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	80.212.0000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	80.212.0000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				57.970.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			57.970.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD	2 THL	40.150.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD	2 THL	40.150.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 ASN	17.820.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 ASN	17.820.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				27.489.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			27.489.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan dan	3 ASN	27.489.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan dan	3 ASN	27.489.000	

	dan Fungsi		diklat kepemimpinan			dan Fungsi	diklat kepemimpinan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.543.920	Administrasi Umum Perangkat Daerah			261.543.920	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 paket	2.200.330	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 paket	2.200.330	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	33.447.480	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	33.447.480	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	2.327.435	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	2.327.435	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Dinas Ketahanan Pangan yang dibutuhkan	1 paket	32.454.675	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Dinas Ketahanan Pangan yang dibutuhkan	1 paket	32.454.675	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat	12 bulan	191.114.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah	12 bulan	191.114.000	

			(K/L) yang diikuti				provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				38.899.025	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			38.899.025
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	6 unit	38.899.025	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	6 unit	38.899.025
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.651.894	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115.651.894
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Ketahanan Pangan	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	91.341.894	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	91.341.894
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	2 THL	24.310.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	2 THL	24.310.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				103.015.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			103.015.000

	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	21 unit	63.580.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	21 unit	63.580.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	13 unit	30.635.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	13 unit	30.635.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah gedung /bangunan kantor yang dipelihara	1 paket	8.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung /bangunan kantor yang dipelihara	1 paket	8.800.000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				573.509.200	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			573.509.200	

	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				573.509.200	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			573.509.200	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	1 paket	573.509.200	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	1 paket	573.509.200	
C.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1.023.206.195	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1.023.206.195	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				178.585.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			178.585.000	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan	Kabupaten Pasaman	Jumlah dokumen Neraca Bahan	1 Dokumen	79.585.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan	Jumlah dokumen Neraca Bahan	1 Dokumen	79.585.000	

	Makanan	Barat	Makanan			Makanan	Makanan			
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kecamatan yang dipantau mengenai stok, pasokan dan harga pangan	11 kecamatan	55.000.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kecamatan yang dipantau mengenai stok, pasokan dan harga pangan	11 kecamatan	55.000.000	
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah gapoktan yang difasilitasi dan dibina	10 gapoktan	44.000.000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah gapoktan yang difasilitasi dan dibina	10 gapoktan	44.000.000	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				374.536.250	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			374.536.250	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Kabupaten Pasaman Barat - Bukittinggi	Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	50 Ton	374.536.250	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	50 Ton	374.536.250	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				470.084.945	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			470.084.945	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen konsumsi pangan/PPH	1 Dokumen	79.999.945	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen konsumsi pangan/PPH	1 Dokumen	79.999.945	

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang difasilitasi dan dibina	12 Kelompok	352.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang difasilitasi dan dibina	12 Kelompok	352.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	20 kali	41.085.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	20 kali	41.085.000	
D.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				159.500.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			159.500.000	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				60.500.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			60.500.000	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah buku penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang difasilitasi	1 dokumen	60.500.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah buku penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang difasilitasi	1 dokumen	60.500.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				99.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			99.000.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah koordinasi dan sikronisasi yang dilaksanakan	20 kali	99.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sikronisasi yang dilaksanakan	20 kali	99.000.000	
E.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				44.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			44.000.000	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				44.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			44.000.000	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kelembagaan yang dibina dan difasilitasi	3 kelompok	44.000.000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan yang dibina dan difasilitasi	3 kelompok	44.000.000	
	Jumlah				5.868.963.769				5.868.963.769	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian dilapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang. Kajian dan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jejaring aspirasi terkait kebutuhan dari harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; dan
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, yang disajikan dalam tabel 2.5 (Tabel T-C.32) berikut :

TABEL T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN PASAMAN BARAT

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Dinas Ketahanan Pangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	
<i>1</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Ketahanan Pangan</i>	<i>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</i>	<i>100</i>	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	7 dokumen	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	3 dokumen	
<i>2</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Ketahanan Pangan</i>	<i>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</i>	<i>100</i>	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	16 PNS	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah non PNS (PTT/THL) Penunjang administrasi perkantoran	14 ASN	
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	7 PNS	
<i>3</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Ketahanan Pangan</i>	<i>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</i>	<i>100</i>	
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada Dinas Ketahanan Pangan	2 ASN	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 PNS	
4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Ketahanan Pangan</i>	<i>Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</i>	<i>100</i>	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan	4 PNS	
4.2	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	5 PNS	
4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	5 PNS	
5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Ketahanan Pangan</i>	<i>Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>100</i>	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 Paket	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Dinas Ketahanan Pangan yang dibutuhkan	1 paket	
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah koordinasi dan konsultasi	150 kali	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Dinas Ketahanan Pangan</i>	<i>Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100	
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	3 Unit	
7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Dinas Ketahanan Pangan</i>	<i>Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100	
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Ketahanan Pangan	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bln	
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	2 ASN	
8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Dinas Ketahanan Pangan</i>	<i>Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	21 Unit	
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	29 Unit	
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah gedung /bangunan kantor yang dipelihara	1 paket	
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kabupaten Pasaman Barat	% ketersediaan pangan utama	90.65	
1	<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kabupaten Pasaman Barat</i>	<i>Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM</i>	100	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	1 Paket	
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	15 kali	
1.3	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah peta kebutuhan	1 dokumen	
C	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kabupaten Pasaman Barat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90,63	
<i>1</i>	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka</i>	<i>Kabupaten Pasaman Barat</i>	<i>- Pemantauan ketersediaan pangan dan pengumpulan data, Pemantauan harga pangan dan pembinaan kelembagaan poktan</i>	<i>100</i>	
1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan	15 Buku	
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	4 kali	
1.3	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kecamatan yang dipantau mengenai stok, pasokan dan harga pangan	11 Kecamatan	
1.4	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Gapoktan yang di Fasilitasi dan dibina	10 Gapoktan	
1.5	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kabupaten Pasaman Barat	Konsumen Pasaman Barat	11 Kecamatan	
<i>2</i>	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kabupaten Pasaman Barat</i>	<i>Terlaksananya pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan</i>	<i>12 Laporan</i>	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	4 kali	
2.2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	3 Ton	
3	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Kabupaten Pasaman Barat</i>	<i>Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan per kapita/tahun</i>	82,40	
3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen konsumsi pangan/PPH	1 dokumen	
3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang difasilitasi dan dibina	16 KWT	
3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	3 kali	
D	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase program penanganan kerawanan pangan	100	
1	<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>Kabupaten Pasaman Barat</i>	<i>Adanya peta kerentanan dan ketahanan pangan</i>	1 Dokumen	
1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Buku FSVA	20 buku	
2	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kabupaten Pasaman Barat</i>	<i>Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten</i>		
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	10 kali	

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyusunan Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu)	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah penyusunan, pengadaan cadangan pangan	2 ton	
E	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	
1	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kabupaten Pasaman Barat</i>	<i>Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar</i>	<i>100</i>	
1.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kelembagaan yang dibina dan difasilitasi	2 Kelompok	
1.2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah sertifikasi keamanan pangan	1 kelompok	
1.3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah komoditi yang terdaftar	2 komoditi	
1.4	Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah sarana yang tersedia	1 paket	

Dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat selain melaksanakan kegiatan dengan dana APBD Kabupaten juga melaksanakan kegiatan dari dana APBD Provinsi dan dana APBN. Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2021 adalah program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan :

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota;
2. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan;
3. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
5. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
6. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
7. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN



3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pemantapan ketahanan pangan yang dijalankan adalah :

- a. Memiliki peranan dalam penurunan stunting daerah, dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - ❖ Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
 - ❖ Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
 - ❖ Olahan Pangan Lokal
- b. Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan diarahkan untuk :
 - ❖ Penyediaan Pangan diutamakan dari produksi dalam negeri.
 - ❖ Pencegahan dan Penanggulangan rawan pangan secara dinamis.
 - ❖ Peningkatan akses pangan masyarakat secara fisik, sosial dan ekonomi dalam penyediaan pangan.
- c. Peningkatan distribusi pangan diarahkan pada :
 - ❖ Terwujudnya sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan serta cadangan pangan.
 - ❖ Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait yang mendukung kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan.
- d. Peningkatan konsumsi dan keamanan pangan diarahkan untuk :
 - ❖ Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (beragam, bergizi, berimbang, aman serta halal) berbasis pangan lokal.
 - ❖ Pengembangan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial.
 - ❖ Pengembangan dan pengawasan keamanan pangan di tingkat produsen dan konsumen.
 - ❖ Meningkatkan daya saing produk olahan pangan dalam menghadapi pasar MEA.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan kedaulatan Pangan	Meningkatkan ketersediaan pangan	1. Persentase ketersediaan pangan utama (%) 2. Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%);
	Meningkatnya distribusi dan akses pangan	1. Persentase capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K); 2. Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi pangan strategis
	Meningkatkan Keragaman konsumsi dan keamanan pangan	1. Persentase skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi; 2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi Pangan (KWT); 3. Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1. Peningkatan nilai SAKIP 2. Level maturitas SPIP 3. % penurunan temuan

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Visi Kabupaten Pasaman Barat **“Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”** yang dituangkan dalam misi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat berada pada misi 4 sasaran 1 yaitu “Peningkatan kedaulatan pangan”.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat merupakan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Jumlah Program sebanyak 5 program, 15 kegiatan, dan 30 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 4.678.894.823,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana kerja dan pendanaan untuk kegiatan tahun 2022 merupakan implementasi tahun ke-2 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala Dinas Ketahanan Pangan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap ketercapaian visi dan misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan 5 program (teknis dan rutin), 15 Kegiatan dan 30 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2022 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar ***Rp. 4.678.894.823,- (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah),*** Rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 (Tabel T-C 33).

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil			Tolok Ukur	Target	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							4,678,894,823		6,525,860,148		
2 09 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %			3,706,182,373		4,475,623,213			
2 09 0 1	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			100 %			32,130,830		34,937,540			
2 09 0 1	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	7 Dokumen	30,370,830	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	33,001,540
2 09 0 1	2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang disusun	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 Dokumen	1,760,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	1,936,000
2 09 0 1	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah			100 %			3,127,672,123		3,775,659,949			
2 09 0 1	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Persentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	15 ASN	2,869,556,123	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	3,472,162,909

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah non PNS (PTT/THL) Penunjang administrasi perkantoran	Persentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 PTT, 14 THL	177,904,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	215,263,840
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Persentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	80,212,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	88,233,200
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah				100 %			46,100,000				63,767,000
2	09	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 THL	36,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	44,165,000
2	09	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 ASN	9,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	19,602,000
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah				100 %			20,490,000				30,237,900
2	09	01	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Sosialisasi dan Bimtek	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 ASN	3 ASN	20,490,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	30,237,900
2	09	01	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				100 %			262,216,335				287,698,313

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

2	09	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Paket	2,200,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah Persentase pelayanan penunjang pemerintah	100 %	2,420,363
2	09	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Paket	33,447,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah Persentase pelayanan penunjang pemerintah	100 %	36,792,228
2	09	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 paket	2,999,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah Persentase pelayanan penunjang pemerintah	100 %	2,560,179
2	09	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map Dinas Ketahanan Pangan yang dibutuhkan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	4 Paket	32,454,675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah Persentase pelayanan penunjang pemerintah	100 %	35,700,143
2	09	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	3 kali 12 Bulan	191,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah Persentase pelayanan penunjang pemerintah	100 %	210,225,400

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

2	09	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				100 %			16,000,000			42,788,928	
2	09	0	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	4 Unit	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	42,788,928
2	09	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				100 %			105,138,085			127,217,083	
2	09	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	83,038,085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	100,476,083
2	09	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Orang THL	22,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	26,741,000
2	09	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				100 %			96,435,000			113,316,500	
2	09	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			21 Unit	57,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	69,938,000

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

2	09	019	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			13 Unit	30,635,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	33,698,500	
2	09	019	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah gedung /bangunan kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Paket	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	0	9,680,000	
2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	% ketersediaan pangan utama					90.65		25,000,000				630,860,120	
2	09	021		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan dan LPM					100 %		25,000,000					630,860,120
2	09	021	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang tersedia	Persentase tersusunnya rencana Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65 Indeks	1 Paket	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketahanan Pangan	65 Indeks		630,860,120
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi dan protein perkapita					90.63		757,712,450					1,195,526,815
2	09	031		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam	Pemantauan ketersediaan pangan dan pengumpulan data, Pemantauan harga pangan dan pembinaan kelembagaan poktan					100 %		205,990,000					266,443,500

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Indeks Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan	Persentase terlaksananya rencana Infrastruktur Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	70,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketahanan Pangan	65 Indeks	87,543,500
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Jumlah kecamatan yang dipantau mengenai stok, pasokan dan harga pangan	Persentase terlaksananya rencana Infrastruktur Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketahanan Pangan	65 Indeks	60,500,000
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Jumlah Gapoktan yang di Fasilitasi dan dibina	Persentase terlaksananya rencana Infrastruktur Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketahanan Pangan	65 Indeks	48,400,000
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Indeks Ketahanan Pangan		Persentase terlaksananya rencana Infrastruktur Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketahanan Pangan	65 Indeks	70,000,000
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan				12 Laporan	62,237,500				411,989,875
2	09	03	2.03	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Jumlah pengadaan cadangan pangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62,237,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketahanan Pangan	65 Indeks	411,989,875
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya upaya pelaksanaan peningkatan target konsumsi pangan per kapita/tahun				82.40	489,484,950				517,093,440

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

2	09	034	2.0	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah dokumen konsumsi pangan/PPH	Persentase pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				45,399,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	90 %	84,699,940
2	09	034	2.0	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang difasilitasi dan dibina	Persentase pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				399,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	90 %	387,200,000
2	09	034	2.0	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	Persentase pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				45,085,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	90 %	45,193,500
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase program penanganan kerawanan pangan				100 %		150,000,000					175,450,000
2	09	041	2.0		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Adanya peta kerentanan dan ketahanan pangan				1 Dokumen		60,000,000					66,550,000
2	09	041	2.0	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah data dasar penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang difasilitasi	Persentase terlaksananya penanganan Kerawanan Pangan kewenangan kabupaten	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	100 %	66,550,000
2	09	042	2.0		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kabupaten						90,000,000					108,900,000

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

2	09	04	2.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Persentase terlaksananya penanganan Kerawanan Pangan kewenangan kabupaten	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	100 %	108,900,000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan							40,000,000				48,400,000
2	09	05	2.0	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar							40,000,000				48,400,000
2	09	05	2.0	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah kelembagaan yang dibina dan difasilitasi	Persentase pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan program Pengawasan	40 %	48,400,000
TOTAL												4,678,894,823			6,525,860,148		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 merupakan rangkuman kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan ketahanan pangan. Mengingat masalah pangan dan gizi bersifat lintas sektoral, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah. Apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan kebijaksanaan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.

Membangun terus kemitraan dengan semua *stakeholder* merupakan kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Namun apa yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga masih diperlukan kerja dan usaha yang lebih keras dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik dimasa mendatang, untuk itu tidak menutup kemungkinan adanya masukan dan saran dalam penyempurnaan kegiatan yang akan datang.

Sukamenanti, 06 Agustus 2021

